

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

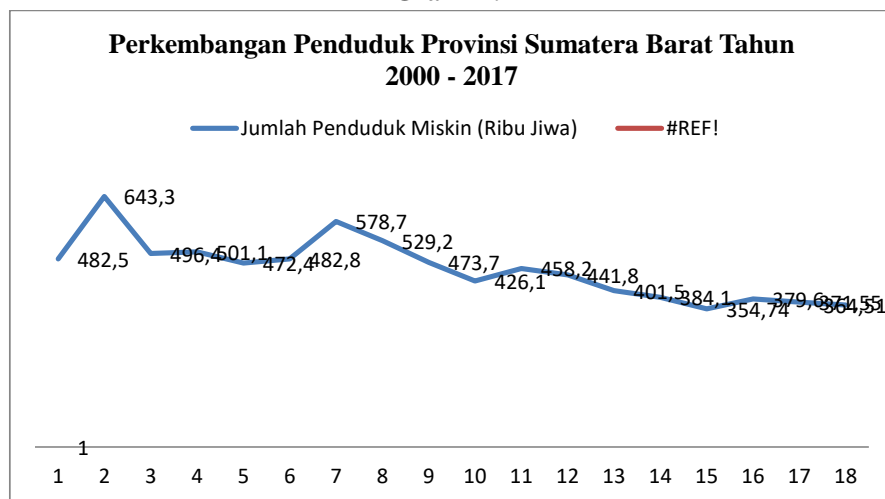
Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju.

Di Provinsi Sumatera Barat kemiskinan masih merupakan masalah yang perlu di atasi bersama tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi yakni mencapai 482,50 ribu jiwa pada tahun 2000 meningkat menjadi 643,30 ribu jiwa pada tahun 2001, namun pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat menurun menjadi 496,40 ribu jiwa dan kembali meningkat menjadi 501,10 ribu jiwa pada tahun 2003. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat mencapai 472,40 ribu jiwa meningkat kembali menjadi 482,80 ribu jiwa pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mencapai 578,70 ribu jiwa. Namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun di setiap tahunnya. Penurunan ini terus terjadi hingga akhir tahun 2017 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 364,51 ribu jiwa Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2000-2017(**BPS** Berbagai Edisi)

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain

akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena masyarakat itu sendiri yang kurang produktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga susah untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini.

Grafik 1.1



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (2000 – 2017)

Pada grafik 1.1 dapat kita lihat perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2000 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mencapai 482,5 ribu jiwa meningkat menjadi 643,3 ribu jiwa pada tahun 2001 dengan pertumbuhan mencapai 33,33 persen, sedangkan pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin mencapai 496,4 ribu jiwa dengan penurunan persentase mencapai 22,84 persen. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat mencapai 529,2 ribu jiwa dengan penurunan persentase mencapai 8,55 persen, namun pada tahun 2010 pertumbuhan jumlah penduduk miskin

meningkat dengan persentase sebesar 7,53 persen atau sebanyak 458,2 ribu jiwa. Dan terus menurun hingga akhir tahun 2017 jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat mencapai 364,51 ribu jiwa dengan penurunan mencapai 1,89 persen.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera barat mencapai 3,66 persen sedangkan pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi provinsi sumatera barat mencapai 4,69 persen dan meningkat kembali pada tahun 2004 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen dan terus meningkat hingga akhir thun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen.

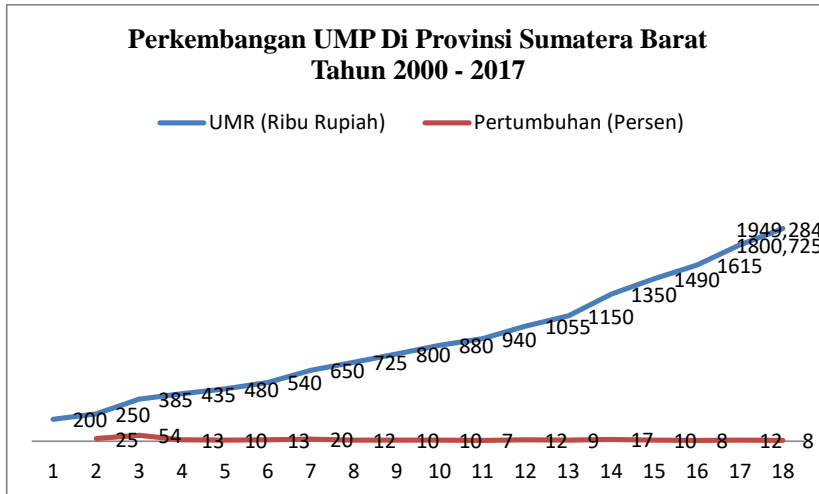
Selain itu kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan berkembang sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHL), sehingga di harapkan dapat menjamim tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sonny Sumarsono, 2003)

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya,

yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005), KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari. Oleh karena itu, KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Untuk lebih jelasnya perkembangan UMP Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 1.2 dibawah ini :

Grafik 1.2



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (2000 – 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan UMP Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2000 sampai 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 UMP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.200.000,00 meningkat menjadi Rp.250.000,00 dengan pertumbuhan 25,persen pada tahun 2001, sedangkan pada tahun 2002 UMP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.385.000,00 dengan pertumbuhan 54,00 persen. Pada tahun 2004 UMP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.480.000,00 dengan pertumbuhan 10,34 persen. Hingga tahun 2010 UMP provinsi Sumatera Barat mencapai Rp.940.000,00 dengan pertumbuhan mencapai 6,82 persen sedangkan pada tahun 2011 UMP Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp.1.055.000,00 dengan pertumbuhan 12,23 persen. Dan terus meningkat hingga akhir tahun 2017 dengan UMP sebesar Rp.1.949.284,00 dengan pertumbuhan 8,25 persen.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sudono Sukirno,2003).

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2000 sampai 2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2000 TPT Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,38 persen meningkat menjadi 8,74 persen pada tahun 2001 sedangkan pada tahun 2002 TPT Provinsi Sumatera Barat mencapai 9,62 persen. Pada tahun 2005 TPT Provinsi Sumatera Barat mencapai 13,34 persen dan pada tahun 2006 TPT mencapai 8,04 dan turun pada tahun 2015 TPT Provinsi Sumatera Barat mencapai 6,89 persen. Hingga akhir tahun 2017 TPT di Provinsi Sumatera Barat mencapai 5,58 persen.

Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Selain itu terjadi fluktuasi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat salah satunya disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat yang terpaksa harus menganggur. Berdasarkan uraian pada latar belakang penulisan ini maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Pengangguran Terhadap Jumlah penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat?

Comment [WU1]: Pakah ini upah minimum regional ? atyau nasional?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitiaj ini adalah

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan penulis tentang upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya, yang berminat meneliti lebih lanjut tentang jumlah penduduk, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak ketiga baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun masyarakat luas

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari fenomena tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini disajikan landasan teori tentang, kemiskinan, jumlah penduduk, upah minimum, pengangguran, dan faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Provinsi Sumatera Barat. Dan uraian variabel penelitian.

Bab V Hasil Dan Pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penelitian.